

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.

Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Diterjemahkan oleh: M. Khorim, 2018, Cetakan VI, Bandung: Nusa Media.

Hasibuan, Malayu S.P., 1984, *Manajemen dasar: pengertian dan masalah*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak*, edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.

Ismail, Tjip, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing.

Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi offset, Yogyakarta.

Rosdiana, Haula dan Raisin Tarigan, 2005, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Pers.

Siahaan, MARIHOT P., 2006, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sumitro, Ronny Hanintyo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **B. Makalah**

Sidik, Machfud, “Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, *Makalah*, Seminar Nasional, Yogyakarta, 20 April 2002.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7630/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

## **D. Hasil Penelitian**

Priyanto, Junaidi Arif, 2012, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Di Provinsi Kalimantan Timur*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

P., Asril, 2015, *Analisis Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rohman, Hermanto, 2011, *Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat : studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Septyorini, Dian Ayu, 2015, *Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Asas Keadilan Perpajakan di Kalimantan Selatan*, Skripsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### E. Internet

BPPD Provinsi Jawa Tengah, Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Objek Pajak Daerah, <http://bppd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/lap-pertanggung-jwb-bendahara-penerimaan-opd-2018-min.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.23 WIB.

Fachrudin, Fachri, “MK Minta Ketentuan Pajak Alat Berat Diatur Ulang”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/22583001/mk-minta-ketentuan-pajak-alat-berat-diatur-ulang?page=1>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 02.18 WIB.

Info Cargonesia, Definisi Alat Berat, <https://kirimalatberat.com/definisi-alat-berat/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

Laks, Edy, “Pembangunan Jalan Diprioritaskan”, <http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201401/1979/pembangunan-jalan-diprioritaskan.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019.